

PANDUAN KAMPUNG KB PERCONTOHAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN
TAHUN 2018

PANDUAN PELAKSANAAN KAMPUNG KB PERCONTOHAN



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, buku Panduan Kampung KB Percontohan (*center of excellent*) telah selesai disusun. Penulisan buku panduan ini dibuat dalam rangka menjawab kebutuhan untuk pengembangan Kampung KB di lapangan. Kurangnya pemahaman mengenai tahapan pembentukan dan pengembangan Kampung KB di lapangan berakibat kepada kurang optimalnya program KKBPK dan rendahnya pencapaian target di Kampung KB.

Kampung KB Percontohan dirasakan perlu dibentuk sebagai model Kampung KB di setiap Provinsi, sebagai rujukan bagi Kampung KB yang lain dalam menjalankan program dan kegiatan di Kampung KB-nya. Oleh karena itu kami berharap melalui Buku Panduan Kampung KB Percontohan ini dapat membantu terhadap upaya pengembangan Kampung KB secara keseluruhan. Adapun sasaran pengguna Panduan Kampung KB Percontohan antara lain: Perwakilan BKKBN Provinsi/Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, organisasi perangkat daerah bidang KB di tingkat kabupaten/kota dan Pokja Kampung KB di tingkat kabupaten/kota, Pengelola Kampung KB, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Kampung KB.

Pembuatan buku panduan ini tentunya masih jauh dari sempurna, baik secara konteks maupun konten, untuk itu kami menerima saran dan kritik demi perbaikan ke depan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkonstribusi dalam penyusunan buku panduan ini, semoga buku panduan ini bermanfaat untuk mewujudkan keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Direktur Bina Lini Lapangan

Drs. Wahidin, M. Kes

KATA SAMBUTAN

Kampung KB mendapat perhatian dan apresiasi tinggi sebagai salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan. Secara esensi Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergis dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat Desa/Kelurahan.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program Kampung KB, pasca dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016. Telah banyak kemajuan di berbagai daerah, berkat komitmen yang kuat dan kerjasama lintas sektor yang bergerak dengan satu tujuan untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera dan berkualitas. Tahun 2018 ini ditargetkan terbentuk satu Kampung KB percontohan (*Center Of Excellent*) di tiap provinsi dan tahun 2019 terbentuk satu Kampung KB percontohan (*Center Of Excellent*) di tiap kabupaten/kota.

Kehadiran panduan ini sangat membantu untuk membentuk Kampung KB Percontohan yang dapat menjadi bahan pembelajaran pengurus Kampung KB di wilayahnya, agar mampu mengembangkan Kampung KB sesuai dengan cita-cita pemerintahan Indonesia yakni meningkatkan kualitas hidup manusia.

Akhir kata semoga buku panduan ini, bermanfaat bagi pengelola Kampung KB di tingkat Provinsi dalam membentuk Kampung KB percontohan (*Center Of Excellent*).

Plt. Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

Dr. dr. Yani, M. Kes, PKK

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Kata Sambutan v
Daftar Isi vii

BAB I. PENDAHULUAN 1
Pengertian Kampung KB 1
Tujuan 2
Sasaran 2
Road Map 3

BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN 5
Pengembangan Kampung KB Percontohan 5
Peta Jalan Pengembangan Kampung KB Percontohan 6
Persyaratan Pemilihan Kampung KB Percontohan 7
Indikator Keberhasilan Kampung KB Percontohan 9

BAB III. MEKANISME PELAKSANAAN 11
Pembentukan Kampung KB Percontohan 11
Pengelolaan Kampung KB Percontohan 13

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI 17
Pelaksana Monitoring dan Evaluasi 17
Tugas Pelaksana dalam Monitoring dan Evaluasi 17

BAB V. PENUTUP 19

LAMPIRAN 21

BAB I

PENDAHULUAN

PENGERTIAN
KAMPUNG KB

Satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.



Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program KKBPK kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan 8 Fungsi Keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. Sasaran Kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh, dan kesertaan ber-KB nya masih rendah. Penggarapan program pembangunan berbagai sektor terkait di Kampung KB ini diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan fasilitasi dari Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT, PKB/PLKB, PKK, institusi masyarakat pedesaan (IMP), tokoh masyarakat, kader, serta lintas sektor terkait.

Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia

TUJUAN



TUJUAN UMUM

Meningkatkan kualitas pengelolaan kampung KB melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sector terkait bersama mitra kerja agar mampu menjadi Kampung KB percontohan.

TUJUAN KHUSUS

1. Meningkatkan pengetahuan pengelola Kampung KB percontohan di dalam mengelola Kampung KB;
2. Meningkatkan Pencapaian Program KKBPK di Kampung KB percontohan;
3. Meningkatkan komitmen dan koordinasi mitra kerja di berbagai tingkatan terhadap keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait di Kampung KB percontohan

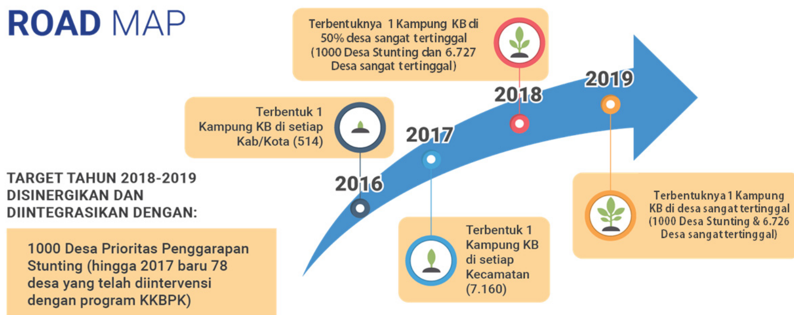
Adapun sasaran pengguna panduan Kampung KB Percontohan antara lain:

a. Untuk perwakilan BKKBN provinsi/Pokja Kampung KB di tingkat provinsi

b. Untuk OPD KB di tingkat Kabupaten/Kota dan Pokja Kampung KB di tingkat kabupaten/kota

c. Pengelola kampung KB

d. Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Kampung KB



Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga Desember 2017 telah terbentuk 7.666 Kampung KB. Di tahun 2019, diharapkan Kampung KB akan terbentuk di setiap desa sangat tertinggal dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengembangan Kampung KB Percontohan

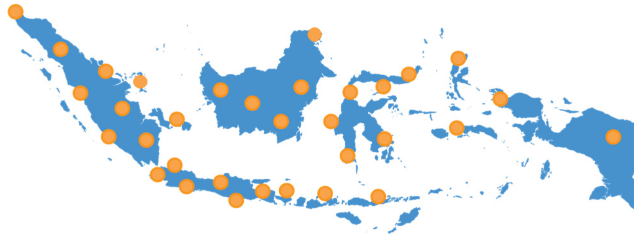
Dalam dua tahun setelah pencanangan Kampung KB, pelaksanaan di lapangan belum seperti yang diharapkan. Dari sekian banyak lokasi kampung KB yang telah dicanangkan terdapat variasi yang sangat besar dalam pelaksanaan di lapangan. Permasalahan utama yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya kegiatan lanjutan setelah pencanangan.

Hal ini disebabkan oleh banyak faktor misalnya kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan konsep Kampung KB, tidak adanya penggerak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB, kurangnya dukungan lintas sektor, dsb. Faktor ini didukung dengan hasil penelitian dari Puslitbang KB & KS pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa: secara umum kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB masing-masing provinsi masih didominasi oleh kegiatan KKBPK, sementara kegiatan dari instansi lintas sektor relatif terbatas; sarana yang ada di Kampung KB umumnya masih terbatas pada sarana KIE kegiatan KKBPK dan sarana KIE dari Kesehatan sementara sarana dari instansi lintas sektor lainnya tidak banyak ditemukan di Kampung KB; dan secara umum, pembinaan Kampung KB masih bersifat sektoral dan belum terjadwal dan belum terkoordinasi. Untuk itu, dianggap perlu untuk menyiapkan **Kampung KB Percontohan** di setiap provinsi di tahun 2018.

KAMPUNG KB PERCONTOHAN 2018

KAMPUNG KB PERCONTOHAN

Adalah Kampung KB yang telah memenuhi prasyarat untuk menjadi Kampung KB Percontohan sesuai dengan panduan Kampung KB Percontohan dan ditujukan untuk menjadi rujukan bagi Kampung KB lain dalam hal pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi kampung.



Di tahun 2018, di setiap provinsi terbentuk 1 Kampung KB percontohan.

Peta Jalan Pengembangan Kampung KB Percontohan

1. Pengembangan Kampung KB Percontohan pada tahun 2018, setiap provinsi memiliki 1 (satu) Kampung KB Percontohan dan pada tahun 2019 setiap kabupaten/kota memiliki 1 (satu) Kampung KB Percontohan.
2. Meningkatkan jumlah keterlibatan lintas sektor yang ada minimal dari Kementerian dan Lembaga, yakni:
   a. Kementerian Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
   b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
   c. Kementerian Dalam Negeri
   d. Kementerian Kesehatan
   e. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
   f. Kementerian Agama
   g. Kementerian Sosial
   h. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

j. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

k. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

l. Kementerian Kelautan dan Perikanan

m. Kementerian Pertanian

n. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

3. Kampung KB Percontohan mendapatkan pendampingan terintegrasi dari seluruh komponen dalam pengelolaan program KKBPK dari setiap Perwakilan BKKBN Provinsi.

4. Setiap Kampung KB Percontohan harus mendapatkan dukungan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dari BKKBN.

Prasyarat Pemilihan Kampung KB Percontohan

Kampung KB yang dijadikan sebagai daerah percontohan ditetapkan dengan persyarakat sebagai berikut :

1. Adanya Penyuluh Keluarga Berencana/Pendamping (tenaga honorer penyuluh KKBPK, PPKBD-Sub PPKBD, pendamping desa, dll)

   - Memastikan adanya rencana kerja masyarakat
   - Memutakhirkan data Kampung KB di http://kampungkb.bkkbn.go.id/kampungkb/
   - Memberikan Informasi dan Konseling tentang kesehatan reproduksi dan alternatif Pilihan kontrasepsi.

- Memastikan adanya pelayanan kontrasepsi.
- Memotivasi dan membina keberlangsungan peserta KB.
- Mengkoordinasikan kegiatan kampung KB dengan berbagai pihak yang terkait
- Melakukan monev berkala dengan pokja, PPKBD, sub PPKBD dan kader poktan

2. Tersedianya bidan di Kampung KB yang sudah mendapatkan pelatihan CTU.
3. Tersedianya regulasi pembentukan Kampung KB mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan desa.
4. Adanya POKJA Kampung KB sesuai 11 aspek (minimal)
   - ketua
   - sekretaris
   - bendahara
   - 8 seksi (agama, sosial dan budaya, kasih sayang, perlindungan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan reproduksi)
5. Adanya sekretariat/posko Kampung KB (secara fungsi)
6. Adanya rencana kerja masyarakat
7. Adanya kelompok kegiatan:
   a. Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)
   b. Bina Keluarga Remaja (BKR)
   c. Bina Keluarga Lansia (BKL)
   d. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
   e. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
   f. Rumah Data Kependudukan(Pojok Kependudukan harus masuk didalamnya).

8. Adanya sumber dana lain (dana desa, partisipasi masyarakat, APBD, CSR)
9. Akses pendidikan dasar hingga 12 tahun secara geografis dapat terjangkau
10. Adanya akses pelayanan kesehatan
11. Adanya komitmen sektor lain untuk terlibat dalam Kampung KB melalui program dan kegiatan yang ada di Kampung KB

Indikator Keberhasilan Kampung KB Percontohan

1. Meningkatnya capaian program KKBPK di Kampung KB Percontohan
   a. Kesertaan KB MKJP.
   b. Kesertaan Jumlah Keluarga yang aktif dalam BKB-HI, BKR, PIK-R, BKL, dan UPPKS.
   c. Meningkatnya pengetahuan remaja dan keluarga tentang isu-isu kependudukan
2. Meningkatnya jumlah program kegiatan lintas sektor di Kampung KB Percontohan.
3. Melakukan 4 langkah mekanisme operasional kampung KB, yaitu: perencanaan, koordinasi dengan lintas sektor, sosialisasi kegiatan, dan monitoring dan evaluasi.
4. Tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan untuk setiap seksi / pelaporan online

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Kampung KB Percontohan memerlukan komitmen dan tanggung jawab bersama dari tingkat pusat sampai tingkat daerah agar proses kegiatan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dan mencapai target yang direncanakan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Kampung KB Percontohan meliputi tugas dan tanggung jawab pengelola dan pelaksana kegiatan yaitu BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Program Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB sebagai berikut:

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB PERCONTOHAN

1. BKKBN Pusat
    a. Mengidentifikasi data dan melakukan pemetaan wilayah serta kebutuhan pengelolaan yang telah diusulkan oleh perwakilan BKKBN provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pembentukan Kampung KB Percontohan.
    b. Melakukan advokasi di tingkat pusat dan provinsi kepada pemangku kebijakan untuk Pembentukan Kampung KB Percontohan.
    c. Menyusun pedoman Kampung KB Percontohan
    d. Memfasilitasi pembinaan dan monev Kampung KB Percontohan melalui Pokja Kampung KB di tingkat pusat dan lintas kementerian/lembaga

2. Perwakilan BKKBN Provinsi

   a. Mengidentifikasi data dan melakukan pemetaan wilayah serta kebutuhan pengelolaan yang telah diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pembentukan Kampung KB Percontohan.

   b. Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk pembentukan Kampung KB Percontohan melalui Pokja Kampung KB di tingkat provinsi dan kabupaten

   c. Menyusun petunjuk teknis kampung KB Percontohan (jika dibutuhkan)

   d. Menyusun surat keputusan pembentukan Kampung KB Percontohan di tingkat provinsi

   e. Memfasilitasi penganggaran, pembinaan, dan monev Kampung KB Percontohan melalui Pokja Kampung KB di tingkat provinsi, kabupaten dan desa/kelurahan

3. Organisasi Perangkat Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

   a. Mengidentifikasi data dan melakukan pemetaan wilayah serta kebutuhan pengelolaan Kampung KB Percontohan.

   b. Melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan dan lintas OPD di tingkat kabupaten dan desa untuk pembentukan Kampung KB Percontohan melalui Pokja Kampung KB Kabupaten.

   c. Menyusun surat keputusan pembentukan Kampung KB Percontohan di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.

   d. Memfasilitasi penganggaran, pembinaan, dan monev Kampung KB Percontohan melalui Pokja Kampung KB di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan

PENGELOLAAN KAMPUNG KB PERCONTOHAN

1. **BKKBN PUSAT**

   a. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga dan program program lintas sektor di kampung KB percontohan di tingkat nasional;

   b. Memastikan pelaksanaan pembinaan mekanisme operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di kampung KB percontohan;

   c. Memastikan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi di kampung KB

   d. Memastikan pelaksanaan pendataan keluarga dan pemutakhiran data basis keluarga di kampung KB percontohan;

   e. Meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan; dan

   f. Memfasilitasi penyediaan rumah data kependudukan (Rumah DataKu) di kampung KB percontohan.

   g. Mengadvokasi sektor kesehatan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia pada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di kampung KB;

2. **PERWAKILAN BKKBN PROVINSI**

   a. Memberikan dukungan melalui penetapan pengelolaan Kampung KB Percontohan dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan;

   b. Melalui Pokja Kampung KB Provinsi/PWG mengadvokasi Bupati/Walikota dan lintas sektor untuk mengoordinasikan pelaksanaan Kampung KB termasuk menyediakan sarana,

prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik termasuk pelayanan KB di wilayahnya masing-masing;

c. Memastikan pelaksanaan pembinaan mekanisme operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di kampung KB percontohan;

e. Memastikan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Kampung KB Percontohan;

f. Meningkatkan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan di Kampung KB Percontohan;

g. Memfasilitasi penyediaan rumah data kependudukan di Kampung KB Percontohan.

h. Mengadvokasi sektor kesehatan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia pada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di kampung KB pada tingkat Provinsi melalui Pokja Kampung KB Provinsi.

3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROGRAM KELUARGA BERENCANA

a. Memberikan dukungan pelaksanaan melalui penetapan pengelolaan Kampung KB Percontohan dan ketersediaan anggaran yang dibutuhkan;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kampung KB antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat melalui Pokja Kampung KB kabupaten;

c. Memanfaatkan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dan penyelenggaraan perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, serta pembangunan lain di Kampung KB Percontohan;

d. Mengadvokasi sektor kesehatan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia pada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kampung KB pada tingkat kabupaten/kota melalui Pokja Kampung KB kabupaten/kota.

e. Memfasilitasi penyediaan sarana ruang terbuka bagi anak-anak, remaja, dan lansia;

f. Memfasilitasi pelaksanaan mekanisme operasional Kampung KB Percontohan;

g. Mendorong peran serta kader KB dan/atau institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dalam Komunikasi, Informasi, dan Eduksai (KIE) di Kampung KB Percontohan;

4. POKJA KAMPUNG KB TINGKAT DESA

a. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi di Kampung KB Percontohan.

b. Memastikan perencanaan kegiatan Kampung KB Percontohan berbasis data.

c. Melakukan sosialisasi KIE tentang penggerakan kegiatan di Kampung KB Percontohan

d. Melakukan kegiatan rutin sesuai dengan rencana kerja

e. Melakukan pencatatan dan pelaporan untuk setiap kegiatan dalam rencana kerja

f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PKB, Aparatur desa dan OPD KB

g. Memastikan terbentuknya dan memberdayakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kampung KB Percontohan;

h. Memastikan pelaksanaan kegiatan Kampung KB Percontohan telah menggunakan berbagai sumber dana yang ada di desa.

i. Memfasilitasi dan menjamin pelaksanaan mekanisme operasional Kampung KB Percontohan;

j. Memastikan dukungan pelaksanaan Kampung KB Percontohan antar Organisasi Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;

k. Memastikan pemanfaatan hasil pendataan keluarga untuk penetapan kebijakan dan penyelenggaraan perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, serta pembangunan lain di Kampung KB Percontohan;

l. Memfasilitasi penyediaan sarana ruang terbuka bagi anak-anak, remaja, dan lansia;

m. Mendorong peran serta institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dan/atau kader KB dalam Komunikasi, Informasi, dan Eduksai (KIE) di Kampung KB;

n. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

1) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat pusat adalah:
   a) Bidang yang menangani monitoring dan evaluasi pada Direktorat Bina Lini Lapangan (Ditbinlap) BKKBN Pusat;
   b) Perwakilan BKKBN provinsi;
   c) Mitra kerja pusat;
2) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi adalah:
   a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang KB yang menangani Kampung KB Percontohan;
   b) Pokja Kampung KB di tingkat provinsi;
3) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/kota adalah:
   a) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang KB yang menangani Kampung KB Percontohan;
   b) Pokja Kampung KB di kabupaten/kota;
4) Pelaksana monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan adalah pengelola Program KKBPK di kecamatan;
5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke Kampung KB percontohan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.

B. Tugas Pelaksana dalam Monitoring dan Evaluasi

1) Menyiapkan berkas dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan dokumen lain yang mendukung;

2) Menentukan lokasi Kampung KB Percontohan yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi;
3) Menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi Kampung KB Percontohan serta dokumen pendukung lainnya;
4) Melakukan koordinasi dengan pelaksana program KKBPK provinsi dan kabupaten/kota, serta kecamatan;
5) Dokumen yang disiapkan disesuaikan dengan wilayah.

BAB V
PENUTUP

Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia

Untui meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung KB maka dibentuklah Kampung KB Percontohan, melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan pembangunan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait bersama mitra kerja agar mampu menjadi Kampung KB Percontohan.

Panduan Kampung KB Percontohan sebagai acuan bagi pengelola program Kampung KB di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk mengembangkan Kampung KB Percontohan pada tahun 2018 disetiap provinsi dan pada tahun 2019 disetiap kabupaten/kota.

Panduan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kampung KB Percontohan tahun 2018 dan 2019.

Plt. Deputi Bidang Advokasi,
Penggerakan dan Informasi,

Dr. dr. Yani, M. Kes, PKK

LAMPIRAN

Instruksi:
1. Kolom "Indikator" berisi dengan pertanyaan indikator yang perlu dilengkapi di setiap barisnya pada kolom "Keterangan"
2. Kolom "Keterangan" menjawab pertanyaan pada kolom "indikator". Kolom dapat diisi dengan data berupa angka pada pertanyaan tentang jumlah dan nominal, serta dapat diisi dengan keterangan berupa kategori seperti "ada atau tidak"
3. Silahkan isi kolom "Catatan Lainnya" untuk menambahkan informasi pada kolom keterangan

Data Baseline Kampung KB Percontohan / Center of Excellence

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Tim Monitoring :

No.	Indikator	Keterangan	Catatan Lainnya
A.	**Sumber Daya Manusia (SDM)**		
1.	Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)		
2.	Jumlah bidan		
	a. Bidan yang terlatih CTU		
	b. Bidan CTU yang melayani KB MKJP		
3.	Pokja Kampung KB		
	a. Jumlah anggota dan komposisi		
	b. Rencana kerja Pokja KKB		
	c. Pendataan Wilayah Kerja KKB		
B.	**Pemberdayaan Masyarakat**		
4.	Jumlah Kader KB (PPKBD, Sub-PPKBD)		
5.	Jumlah Kelompok Kegiatan		
	a. Bina Keluarga Balita (BKB)		
	b. Bina Keluarga Remaja (BKR)		
	c. Bina Keluarga Lansia (BKL)		
	d. UPPKS		
	e. PIK Remaja		
6.	Jumlah Kelompok Kegiatan yang pernah mendapatkan pelatihan		
	a. Bina Keluarga Balita (BKB)		
	b. Bina Keluarga Remaja (BKR)		
	c. Bina Keluarga Lansia (BKL)		
	d. UPPKS		
	e. PIK Remaja		
7.	Jumlah Kelompok Kegiatan yang memiliki rencana kerja		
	a. Bina Keluarga Balita (BKB)		
	b. Bina Keluarga Remaja (BKR)		
	c. Bina Keluarga Lansia (BKL)		
	d. UPPKS		
	e. PIK Remaja		

C.	**Anggaran**		
8.	Jumlah anggaran program KKB		
9.	Sumber dana lainnya untuk kegiatan KKB		
D.	**Regulasi dan Dukungan Lintas sektor**		
10.	Regulasi pembentukan KKB		
11.	Kerja sama dengan Lintas Sektor		
	a. Jumlah Lintas Sektor yang tergabung dalam Pokja KKB		
	b. Jumlah pertemuan koordinasi dengan lintas sektor		
	c. Jumlah Lintas Sektor yang sudah berkontribusi dalam kegiatan KKB		
E.	**Fasilitas dan Sosialisasi**		
12.	Fasilitas Pendidikan Dasar sd. 12 tahun		
	a. Jumlah fasilitas pendidikan dasar		
	b. Sosialisasi akses pendidikan dasar ke msayarakat		
	c. Media sosialisasi		
13.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	a. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan		
	b. Sosialisasi akses pendidikan pelayanan kesehatan ke masyarakat		
	c. Media sosialisasi		
F.	**Capaian KB**		
14.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di KKB		
15.	Jumlah Peserta Baru (PB) KB		
16.	Jumlah Peserta baru (PB) KB MKJP		
17.	Jumlah Peserta Aktif (PA) KB		
18.	Jumlah Peserta Aktif (PA) KB MKJP		

Instruksi:
1. Daftar TBT ini merupakan alat bantu pemantauan implementasi kegiatan di Kampung KB Percontohan.
2. Daftar TBT digunakan oleh Tim Monitoring pada saat Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.
3. Daftar TBT memuat kolom data dasar awal (baseline) dalam Bimtek/yang diisi pada saat Bimtek (serta kolom Bimtek & yang disaat kunjungan Bimtek.
4. Setelah mengisi kolom daftar titik, Tim Monitoring akan melakukan diskusi untuk mengidentifikasi kemajuan hambatan dan rencana tindak lanjut untuk Bimtek selanjutnya.

Daftar Tilik Bimbingan Teknis Kampung KB Percontohan / Center of Excellence

Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Tim Monitoring :

Tema	Indikator	Baseline	Bimtek I		Bimtek II	
			Tandai	Keterangan	Tandai √	Keterangan
Sumber daya Manusia	Tersedianya minimal 1PKB yang melakukan KIE KB					
	Tersedianya minimal 1bidan CTU yang melayani KB MKJP					
	Terlaksananya minimal 4 kali pertemuan reguler Pokja KKB					
	Terealisasinya minimal 40% rencana kerja sampai dengan Bimtek I dan minimal 80% rencana kerja sampai dengan Bimtek II					
Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya PPKBD di wilayah KKB					
	Tersedianya Sub-PPKBD di wilayah KKB					
	Tersedianya kelompok kegiatan BKB					
	Tersedianya kelompok kegiatan BKR					
	Tersedianya kelompok kegiatan BKL					
	Tersedianya kelompok kegiatan UPPKS					
	Tersedianya kelompok kegiatan PIK Remaja					
	Kelompok BKB mendapatkan pelatihan					
	Kelompok BKR mendapatkan pelatihan					
	Kelompok BKL mendapatkan pelatihan					
	Kelompok UPPKS mendapatkan pelatihan					
	Kelompok PIK Remaja mendapatkan pelatihan					
	Kelompok BKB memiliki rencana kerja					
	Kelompok BKR memiliki rencana kerja					
	Kelompok BKL memiliki rencana kerja					
	Kelompok UPPKS memiliki rencana kerja					
	Kelompok PIK Remaja memiliki rencana kerja					
Anggaran	Tersedianya anggaran untuk kegiatan KKB					
	Terpetakannya sumber dana lainnya					
Regulasi dan Dukungan Lintas Sektor	Terdokumentasinya regulasi pembentukan Pokja KKB					
	Teridentifikasinya lintas sektor yang terlibat dalam kegiatan KKB					
	Terlaksananya minimal 3 kali pertemuan koordinasi dengan lintas sektor					
	Minimal 3 rektor sudah berkontriusi dalam kegiatan KKB					
Fasilitator	Tersedianya minimal 1 fasilitas pendidikan dasar					
	Tersedianya minimal 1 fasilitas kesehatan pratama					
	Tersedianya jejaring layanan kesehatan lainnya					
Capaian KB	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di KKB					
	Jumlah Peserta Baru (PB) KB					
	Jumlah Peserta Baru (PB) KB MKJP					
	Jumlah Peserta Aktif (PA) KB					
	Jumlah Peserta Aktif (PA) KB MKJP					

BIMTEK I	BIMTEK II
Kemajuan dalam pelaksanaan program KKB dalam 6 bulan terakhir (Bimtek I)	Kemajuan dalam pelaksanaan program KKB dalam 6 bulan terakhir (Bimtek II)
Hambatan pelaksanaan program KKB dalam 6 bulan terakhir (bimtek I):	Hambatan pelaksanaan program KKB dalam 6 bulan terakhir (Bimtek II):
Rencana Tindak Lanjut untuk Bimtek II:	Rencana Tindak Lanjut pasca Bimtek II:
Tanggal Bimtek I :	Tanggal Bimtek II :

Padat Penduduk

Bantaran Kereta Api

Daerah Aliran Sungai

Terpencil

Kawasan Industri

Kawasan Miskin

Pesisir/ nelayan

Kumuh

Kawasan Wisata

Perbatasan

